



## **GUBERNUR RIAU**

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU, PROGRAM DAN  
INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI RIAU DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tahun 2007, Gubernur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan unit kerja mandiri dibawahnya dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, diperlukan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
  8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
7. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahunan.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. penetapan IKU Pemerintah Provinsi sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pembangunan Daerah.
- b. penetapan program dan indikator program RPD sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan *outcome* pembangunan Daerah.
- c. penetapan IKU Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan Kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi Kinerja dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

### BAB II

#### PENETAPAN IKU PEMERINTAH PROVINSI, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM RPD DAN IKU PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

Penetapan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah selaras dengan prinsip:

- a. dokumen RPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja;
- d. kebutuhan data statistik Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
- e. perkembangan ilmu pengetahuan.

### BAB III

#### PENGGUNAAN IKU PEMERINTAH PROVINSI, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM RPD DAN IKU PERANGKAT DAERAH

### Pasal 5

IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan Kinerja;
- d. pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan sejalan dengan pencapaian IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah;
- (2) IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi pengembangan Akuntabilitas Kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran Kinerja dan digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

### BAB IV PELAKSANAAN, PEMBINAAN, KOORDINASI, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi pengembangan Akuntabilitas Kinerja.
- (3) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (4) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPD dan IKU Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 19); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 17),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU.

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR 13



No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>mengelola keuangan negara (APBN/APBD).            Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu : 1)            tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait            dengan kewajaran sistem pengendalian internal            kepatuhan, dan 2) tingkat tindak lanjut atas            rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk            perbaikan yang berkelanjutan.            Dengan kategori penilaian :            WTP            WDP            Tidak Wajar            TMP</p>	

**GUBERNUR RIAU,**

**RAHMAN HADI**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>	
1	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Presentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persen)
	<b>INSPEKTORAT</b>	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Yang Terselesaikan (Persen)
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Laporan Hasil Evaluasi (Persen) Persentase OPD Yang Di Fasilitasi (Persen)
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Persen)
2	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (Poin)
3	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas yang Berfungsi Sesuai Regulasi (Persen)
4	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Poin) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Poin)
5	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Timdu PKS Kab/Kota Yang Melaksanakan RAD Secara Efektif (Persen)

**GUBERNUR RIAU,**

**RAHMAN HADI**

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase OPD yang dibina</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah OPD yang dibina}}{\text{Jumlah OPD yang ada}}$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kabupaten/ Kota yang dibina</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang dibina}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang ada}}$

**GUBERNUR RIAU,**

**RAHMAN HADI**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 13 Tahun 2025  
 TANGGAL : 3 Februari 2025

**PERUBAHAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 tahun	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$	Badan Pusat Statistik
			Harapan lama sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka harapan hidup	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya Kesetaraan Gender		Indeks pembangunan gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{laki-laki}}$	Badan Pusat Statistik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.2	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman		Indeks kerukunan umat beragama	Laporan hasil survei Indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama RI dengan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Kementerian Agama
		Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Laporan hasil survei Indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama RI dengan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Kementerian Agama
2.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur		Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar	Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar (%) (peningkatan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun, Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya pelayanan transportasi		Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	$\frac{\text{Pergerakan orang/barang}_{(n)} - \text{Pergerakan orang/barang}_{(n-1)}}{\text{Pergerakan orang/barang}_{(n-1)}}$	Dinas Perhubungan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	$\frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui Provinsi}}{\sum \text{Demand Kapasitas yang memerlukan pelayanan}} \times 100\%$ <p>Pembilang : Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota            Penyebut : Jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi	$\frac{\text{Jumlah KK pelanggan PLN dan non PLN}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya infrastruktur	Persentase lahan pertanian yang	$\frac{\text{luas lahan pertanian yang teririgasi dengan baik}}{\text{luas lahan pertanian}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		pengelolaan sumber daya air	teririgasi dengan baik		Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.2	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan		Indeks kualitas lingkungan hidup	$\text{IKLH Provinsi} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ <p>Di mana : IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan hidup tingkat Provinsi  IPA = indeks pencemaran air  IPU = indeks pencemaran udara  ITH = indeks tutupan hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	$\text{Nilai relatif} = \frac{Ci}{Lij}$ $IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_{\text{Rata-rata}}^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$ <p> <math>0 \leq Pij \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; Pij \leq 5,0 \rightarrow</math> cemaran ringan  <math>5,0 &lt; Pij \leq 10,0 \rightarrow</math> cemaran sedang  <math>Pij &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemaran berat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>
		Indeks Kualitas Air Laut			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> </ul>

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Indeks Kualitas Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times (50 / 54,3))$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Menurunnya emisi gas rumah kaca	emisi gas rumah kaca	Emisi Gas Rumah Kaca (satuan berat CO2 Ekuivalen) = Data Aktivitas x Faktor Emisi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1	Mewujudkan perekonomian yang mandiri		Laju pertumbuhan ekonomi	$(PDRB\ HK\ (DM/TM)\ tahun\ t) - (PDRB\ HK\ (DM/TM)\ tahun\ t - 1)$	Badan Pusat Statistik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	dan berdaya saing				
		Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai ADHB PDRB	<p>Nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dalam 1 (satu) tahun</p>	Badan Pusat Statistik
			Koefisien Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:            Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i            Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i            Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <math>G &lt; 0,3</math> = ketimpangan rendah</li> <li><input type="checkbox"/> <math>0,3 \leq G \leq 0,5</math> = ketimpangan sedang</li> <li><input type="checkbox"/> <math>G &gt; 0,5</math> = ketimpangan tinggi</li> </ul>	Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya investasi daerah		Nilai Pembentukan	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sisi konsumsi dalam 1 (satu) tahun	Badan Pusat Statistik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Modal Tetap Bruto (PMTB) Indeks ketahanan pangan	$100 - (H(G + (1 - G)I^p + 0,5Q(1 - H(G + (1 - G)I^p))) 100$ <p>Dimana:  H : rasio penduduk yang mengalami kekurangan pangan terhadap jumlah penduduk  G: proporsi angka kekurangan energi terhadap angka rata-rata kebutuhan energi  I<sup>p</sup> : ketimpangan dalam distribusi yang diukur dengan koefisien GINI dari distribusi konsumsi energi  Q : koefisien variasi DES ketersediaan energi untuk konsumsi energi/protein</p>	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran		Persentase penduduk miskin	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Dimana:  <math>\alpha = 0</math>  z = garis kemiskinan  y<sub>i</sub> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y<sub>i</sub> &lt; z  q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  n = jumlah penduduk</p>	Badan Pusat Statistik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100$	Badan Pusat Statistik
4.1	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu		Persentase pemajuan Budaya Melayu Riau	$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan
	Meningkatnya keberlanjutan Budaya Melayu Riau		Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	$\frac{\sum \text{data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan}}{\sum \text{data Objek Pemajuan Kebudayaan}}$	Dinas Kebudayaan
	Meningkatnya Pengembangan Budaya Melayu Riau		Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Obyek Kebudayaan yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100$	Dinas Kebudayaan
	Meningkatnya Pemanfaatan Budaya Melayu Riau		Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah Obyek Kebudayaan yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100$	Dinas Kebudayaan
4.2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata		Jumlah Pengeluaran wisatawan mancanegara	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dalam satu tahun (Milyar Rupiah)	Dinas Pariwisata

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya kunjungan wisatawan Mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Orang)	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kenyamanan wisatawan Mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan dalam satu tahun	Dinas Pariwisata
5.1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel		Indeks reformasi birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)		
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Opini BPK		

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>mengelola keuangan negara (APBN/APBD).            Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu : 1)            tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait            dengan kewajaran sistem pengendalian internal            kepatuhan, dan 2) tingkat tindak lanjut atas            rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk            perbaikan yang berkelanjutan.            Dengan kategori penilaian :            WTP            WDP            Tidak Wajar            TMP</p>	

**GUBERNUR RIAU,**

**RAHMAN HADI**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 13 Tahun 2025**

**TANGGAL : 3 Februari 2025**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan (Persen)
		Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanggulangan Bencana (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Sosial (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perhubungan (Persen)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepemudaan Dan Olahraga (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kelautan dan Perikanan (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang pariwisata (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian Dan Perdagangan (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepegawaian (Persen)
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan Dan Pelatihan (Persen)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		<p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Riset dan Inovasi Daerah (Persen)</p> <p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pengawasan (Persen)</p> <p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pengawasan (Persen)</p> <p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Persen)</p>
1	<p><b>DINAS PENDIDIKAN</b></p> <p>Program Pengelolaan Pendidikan</p>	<p>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 Tahun (APS)</p> <p>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas (APS)</p> <p>Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B (Persen)</p>
2	<p>Program Pengembangan Kurikulum</p>	<p>Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Persen)</p>
3	<p>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Rasio Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus (Poin )</p>
4	<p>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</p>	<p>Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Mengajukan Perizinan Terlayani (Persen)</p>
1	<p><b>DINAS KESEHATAN</b></p> <p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN (Jiwa)</p> <p>Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau (Persen)</p>
2	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (Per1000 Penduduk)</p> <p>Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Persen)</p>
3	<p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p>	<p>Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes Dan Makanan Minuman Yang Memenuhi Standar (Persen)</p>
4	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	<p>Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Persen)</p> <p>Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif (Persen)</p>

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NO	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Persen)
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Yang Didistribusikan (Liter/Detik)
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan Regional (Persen)
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penyediaan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik (Persen)
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Penyediaan Sarana Drainase (Persen)
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Kawasan Yang Terlindungi Daya Rusak Air (Ha) Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik (Persen)
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas (Persen)
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis Yang Dibangun Dan Dipelihara (Persen)
9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Strategis Yang Ditata (Persen)
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Urusan Penataan ruang Yang Terfasilitasi (Persen)
11	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani (Ha)
12	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pemenuhan RLH Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah (Persen)
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)
14	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Penatausahaan Pertanahan (Persen)
15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan Lintas Kabupaten/Kota Yang Termediasi (Persen)
16	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang Terfasilitasi (Persen)
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Persen)

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>		
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Persen)
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota (Persen)
<b>DINAS SOSIAL</b>		
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial (Persen)
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PUB Dan UGB Yang Diselenggarakan Sesuai Standar (Persen)
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan (Persen)
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti (Persen)
5	Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Persen)
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persen)
		Persentase TMPN Yang Dipelihara Sesuai Standar (Persen)
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>		
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja (Persen)
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Klaster Berbasis Kompetensi (Persen)
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa)
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Persen)
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)
6	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan (Persen)
		Jumlah Kawasan Yang Direncanakan (Kawasan)
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persen)
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen)
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (Poin)
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender Dan Anak Di Provinsi Riau (Dokumen)
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Yang Mengalami Peningkatan Capaian Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dan Provinsi Layak Anak (Persen)
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen)
7	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyusun (Grand Design Pembangunan Kependudukan) GDPK 5 Pilar (Persen)
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen)
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Keluarga Melaksanakan Pengasuhan Dan Pendampingan Pembentukan Karakter (Keluarga)
	<b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi (Poin)
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Wilayah Rawan Pangan (Kecamatan)
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Keamanan Pangan Segar (Persen)
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Ton/Ha)
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Tanam Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Ha)
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio Luas Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Luas Serangan OPT Dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura (Persen)
8	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persen)
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan (Persen)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
NO	PROGRAM
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6	program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10	Program Pengelolaan Persampahan
11	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
12	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
13	Program Pengelolaan Hutan
14	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
1	Program Pendaftaran Penduduk
2	Program Pencatatan Sipil
	Persentase Peningkatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Persen)
	Persentase Pembangunan Tanaman Kehati Provinsi (Persen)
	Persentase Limbah B3 Yang Dikelola (Persen)
	Persentase Pengawasan Izin Lingkungan (Persen)
	Persentase Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (Persen)
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari LH/Pameran LH (Persen)
	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kota Bersih di Provinsi Riau (Persen)
	Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Persen)
	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Persen)
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan (Persen)
	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan (Persen)
	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Hutan (Persen)
	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis (Persen)
	Persentase IKM Kabupaten/kota Sangat Baik Terkait Pendaftaran Penduduk (Persen)
	Persentase IKM Kabupaten/kota Sangat Baik Terkait Pencatatan Sipil (Persen)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Pengguna Data Base Kependudukan (Persen)
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Yang Disusun (Dokumen)
6	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa / Desa Adat Yang Difasilitasi (Persen)
7	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerja Sama (Persen)
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Kurang Berkembang (Persen)
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Partisipasi LKD Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Persen)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
6	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Yang Berdaya Saing Dan Produktif (Persen)
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Yang Meningkatkan Skala Usahanya (Persen)
8	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Tertib Usaha (Persen)
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Disparitas Harga Sesuai HET Dan Harga Acuan (Persen)
11	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (Persen)
12	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) (Poin)
13	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (Persen)
15	program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri (Persen)
16	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri (Persen)
17	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Peningkatan Pengelolaan IKM Kab/Kota se-Provinsi Riau (Persen)
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi Yang Siap Ditingkatkan Menjadi RTO (Dokumen)
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (Persen)
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Berdasarkan Izin Prinsip Yang Diterbitkan (Triliun Rupiah)
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Persen)
	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	
1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet Potensial Yang Dibina (Orang)
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Pemuda Yang Dibina Menjadi Kader Pramuka (Orang)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang Dibina (Orang)
	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang Dilindungi Dan Dikembangkan (Data OPK)
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan (Persen)
3	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah Yang Dibina (Objek)
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi (Objek)
5	Program Pengelolaan Permuseum	Indeks Kepuasa Masyarakat Terhadap Museum (Poin)
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi (Pustaka)
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Koleksi Daerah Dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi (Persen)
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip Yang Bernilai Baik (Persen)
	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil Yang Di Kelola (Ha)
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Ditangani (Kasus)
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Produk Hasil Olahan Perikanan (Ton)
	<b>DINAS PARIWISATA</b>	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kategori Maju (Destinasi)
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Persen)
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berorientasi Pasar Nasional/Internasional (Pelaku)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
NO	PROGRAM
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah SDM Kepariwisataaan Ditingkatkan Kualitasnya (Orang) Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif (Persen)
	<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan (Kg/Ha)
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan Yang Terdampak Bencana (Persen)
4	Program Perizinan Usaha Pertanian
	Persentase Usaha Perkebunan Yang Memiliki Izin (Persen)
5	Program Penyuluhan Pertanian
	Persentase SDM Yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persen)
	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan (Persen)
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase Angka Kematian Ternak (Persen) Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan (Persen)
4	Program Penyuluhan Pertanian
	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi (Persen)
	<b>DINAS ENERGI SUMBERDAYA MINERAL</b>
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Rasio Desa Berlistrik (Persen)
2	Program Pengelolaan Aspek Gegeologian
	Persentase Pemakaian Dan Pengusahaan Air Tanah Yang Melakukan Upaya Konservasi (Persen)
3	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina (Persen)
4	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Bauran Energi (Persen)
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
1	Program Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan (Persen)
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian (Persen)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
NO	PROGRAM
3	Program Penataan Organisasi
4	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
5	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
6	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
7	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
8	Program Pengelolaan Perbatasan
	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
1	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
1	Program Kepegawaian Daerah
	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>
	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik (Persen)
	Persentase Terfasilitasinya Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Persen)
	Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan (Persen)
	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Persen)
	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dikendalikan (Persen)
	Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan (Persen)
	Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Persen)
	Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah (Persen)
	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (Persen)
	Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola (Persen)
	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola (Persen)
	Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola (Persen)
	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
	Persentase Pelayanan ASN Yang terselesaikan (Persen)
	Persentase Kelulusan ASN Yang Mengikuti Pelatihan (Persen)
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (Persen)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
NO	PROGRAM
<b>BADAN PENGHUBUNG</b>	
1	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
	Presentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persen)
<b>INSPEKTORAT</b>	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Yang terselesaikan (Persen)
	Persentase Laporan Hasil Evaluasi (Persen)
	Persentase OPD Yang Di Fasilitasi (Persen)
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Persen)
2	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (Poin)
3	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Persentase Ormas yang Berfungsi Sesuai Regulasi (Persen)
4	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi (Poin)
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (Poin)
5	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Persentase Timdu PKS Kab/Kota Yang Melaksanakan RAD Secara Efektif (Persen)

**RIAU.**

**RAHMAN HADI**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 13 Tahun 2025

TANGGAL : 3 Februari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	DINAS PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata - rata Lama Sekolah</li> </ul>	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <ul style="list-style-type: none"> <li>RLS = Rata - rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</li> <li>Xi = Lama sekolah penduduk ke i yang berusia 25 tahun</li> <li>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Harapan Lama Sekolah</li> </ul>	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>HLS_a^t</math> = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t</li> <li><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</li> <li>I = usia (a, a=1, ..., n)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>APK SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C (%)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Murid Keseluruhan SMA, MA, SMK, SMALB, Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18th}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>APM SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C (%)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Murid usia 16 - 18 thn jenjang SMA, MA, SMK, SMALB, Paket C}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 th}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase sekolah SMA yang berakreditasi minimal B</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah SMA yang berakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah SMA seluruhnya}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah SMK yang berakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah SMK seluruhnya}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1</li> <li>• Angka Putus Sekolah</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah guru SMA, SMK yang dikualifikasi S1, D4}}{\text{Seluruh guru}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah}}{\text{Jumlah murid keseluruhan}} \times 100\%$
2.	DINAS KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penurunan Kematian Ibu</li> <li>• Persentase Penurunan Kematian Bayi</li> <li>• Persentase Penurunan KeSmatian Balita</li> <li>• Persentase Stunting</li> <li>• Persentase ODHA yang diobati</li> <li>• Persentase Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular</li> <li>• Persentase Pencapaian Universal Health Coverage</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kematian Ibu pada tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Kematian Ibu tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kematian Ibu sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kematian Bayi pada tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Kematian Bayi tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kematian Bayi sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kematian Balita pada tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Kematian Balita tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kematian Balita sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Balita pendek dan sangat pendek berdasarkan Indikator TB / U(Tinggi Badan dibagi Umur)}}{\text{Jumlah Balita yang diukur tinggi badannya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah ODHA (Orang dengan HIV AIDS) yang diobati}}{\text{Jumlah ODHA hasil estimasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 - 59 tahun yang dilakukan deteksi dini (screening)}}{\text{Faktor resiko penyakit tidak menular}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Success Rate (SR)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Pasien Baru TB BTA Positif (Pasien Sembuh + Pengobatan Lengkap)}}{\text{Jumlah Pasien Baru TB BTA Positif yang diobati}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk berdampak Krisis Kesehatan akibat dan/atau berpotensi Bencana</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana / berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indek Keluarga Sehat</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Keluarga dengan IKS} > 0,800 \text{ (Keluarga sehat 12 Indikator)}}{\text{Jumlah Keluarga terdata di PIS PK (Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga)}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kesehatan Terakreditasi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan</li> </ul>	$\frac{\text{Komulatif nilai setiap unsur pelayanan dari pengguna UPT Pelayanan Kesehatan yang disurvei}}{\text{Jumlah Pasien yang disurvei}}$
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Masyarakat (IKM)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah nilai per unsur Keusioner yang terisi}}{\text{Kepmenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggara Pelayanan Publik}} \times \text{Nilai tertimbang perunsur (0,111)}$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase capaian kualitas indikator pelayanan kesehatan sesuai standar</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah capaian indikator pelayanan kesehatan di RSUD Arifin Achmad}}{\text{Jumlah capaian indikator pelayanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\%$
4.	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>Tingkat Akreditasi</li> </ul>	$\frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ $\frac{\text{Akumulasi nilai skor masing - masing standar yang terdapat dalam bab Akreditasi}}{\text{Kriteria hasil penilaian elemen EP}} \times 100\%$ <p>Jumlah nilai minimal 80% dari 15 Bab yang di survey</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentase Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A yang sudah terpenuhi}}{\text{Jumlah Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A yang harus di ganti}} \times 100\%$
5.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>Tingkat Akreditasi Rumah Sakit</li> </ul>	$\frac{\text{Kumulatif Hasil Penilaian Kepuasan Peanggan/Masyarakat}}{\text{Jumlah Pasien yang di Survey}} \times 100\%$ $\frac{\text{Akumulasi nilai skor masing - masing standar yang terdapat dalam bab Akreditasi}}{\text{Kriteria hasil penilaian elemen EP}} \times 100\%$
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah bangunan gedung keagamaan strategis provinsi yang diselenggarakan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase jalan dan jembatan yang dibangun</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Panjang ruas jalan yang dibangun}}{\sum \text{Panjang jalan provinsi riau yang dibangun}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap</li> </ul>	$\frac{\sum \text{panjang ruas jalan provinsi kondisi mantap}}{\sum \text{panjang jalan provinsi riau}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum</li> </ul>	$\frac{\sum \text{warga negara yang memperoleh air minum melalui perpipaan}}{\sum \text{target penduduk yang menerima air minum melalui perpipaan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya</li> </ul>	Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Luas lahan pertanian beririgasi}}{\sum \text{Luas lahan pertanian fungsional pada kewenangan provinsi}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks ketahanan air</li> </ul>	indeks ketahanan air
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</li> </ul>	$= \frac{\sum \text{pemanfaatan ruang yang sesuai}}{\sum \text{pemanfaatan ruang yang diatur}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanian yang Diselenggarakan</li> </ul>	$= \frac{\sum \text{Layanan Pertanian yang dapat ditangani}}{\sum \text{Layanan Pertanian yang masuk}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata</li> </ul>	$= \frac{\sum \text{bangunan yang diselenggarakan}}{\sum \text{bangunan strategis}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Peningkatan Kualitas Permukiman</li> </ul>	$= \frac{\sum \text{Permukiman yang ditangani}}{\sum \text{target permukiman yang ditangani}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Permukiman yang ditingkatkan layanan SPAM Permukiman}}{\sum \text{target penyediaan layanan SPAM Permukiman}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Permukiman yang ditingkatkan layanan sanitasi permukiman}}{\sum \text{Target penyediaan layanan sanitasi permukiman}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Penyediaan Rumah Layak Huni (n)}}{\sum \text{Target kebutuhan penyediaan rumah layak huni}} \times 100\%$
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Trantibum dan Transmas}}{\text{Jumlah pemeliharaan Trantibum dan Transmas harus dilaksanakan (Titik pengaman, permintaan pengamanan Trantibum dan Transmas serta laporam masyarakat melalui usat pengaduan)}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perda / Perkadayang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditetapkan untuk ditegakkan}} \times 100\%$
8.	DINAS SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial</li> </ul>	<p>Total Jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia (PMKS)</p> <p>Total PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial melalui program dan kegiatan dinas sosial provinsi riau</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berjalan sesuai peran dan fungsinya</li> </ul>	<p>Total PSKS yang diberdayakan melalui program dan kegiatan dinas sosial provinsi riau</p>
9.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Partisipasi Kerja</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk usia kerja}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja terlatih yang terserap}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang terlatih}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pemenuhan pengaturan syarat - Syarat Kerja</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan wajib memnuhi pengaturan}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pemenuhan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang dibina se Provinsi Riau}}{\text{Jumlah perusahaan (Berdasarkan WLKP se Provinsi Riau)}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Transmigrasi yang diberdayakan dan dikembangkan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Kawasan transmigrasi yang diberdayakan dan di kembangkan}}{\text{Jumlah kawasan transmigrasi}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Kawasan Transmigrasi yang diberdayakan dan dikembangkan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Kawasan transmigrasi yang diberdayakan dan di kembangkan}}{\text{Jumlah kawasan transmigrasi}} \times 100\%$
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> </ul>	$\frac{\text{par} + \text{IDM} + \text{Linc} - \text{Dist}}{3}$ <p>Ipar :Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)  IDM : Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)  linc-dist :Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan lama ditambah kasus baru}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Layanan Terpadu</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani pada unit layanan terpadu}}{\text{Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>TFR (Total Fertility Rate)</li> </ul>	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFRI$ $ASFRI = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ <p> TFR : Angka kelahiran total  ASFIR : Angka kelahiran menurut kelompok umur  Bi : jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur I pada tahun tertentu  Pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur I pada pertengahan tahun yang sama  I : kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20 - 24, i=7 untuk kelompok umur 45-49)  K : bilangan konstan biasanya 1000 </p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR) (%)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia reproduksi (15 – 49 thn) atas pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi}}{\text{Jumlah Perempuan usia reproduksi (15 – 49 Thn) atau pasangannya yang memerlukan alat kontrasepsi}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kawin Perempuan (Tahun)</li> </ul>	<p>Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu</p>
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)</li> </ul>	$(30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$ <p>a. IKA : Indeks Kualitas Air  b. IKU : Indeks Kualitas Udara  c. IKTL : Indeks Kualitas Turunan Lahan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Tutupan Lahan</li> </ul>	$\text{IKTL} = 0,23 \text{ ITH} + 0,24 \text{ IPH} + 0,30 \text{ IKT} + 0,15 \text{ IKBA} + 0,08 \text{ IKH}$ <p>IKLT : Indeks Kualitas Tutupan Lahan  ITH : Indeks Tutupan Hutan  IPH : Indeks Performance Hutan  IKT : Indeks Kondisi Tutupan Tanah  IKBA : Indeks Konservasi Badan Air  IKH : Indeks Kondisi Habitat</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Air</li> </ul>	$PI = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 M - \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 R}{2}}$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
			<p>a. <math>P_{ij}</math> : Indeks Pencemaran Indeks Tutupan Hutan</p> <p>b. <math>C_i</math> : Konsentrasi Parameter Kualitas air ke (j) Menyatakan Konsentrasi parameter</p> <p>c. <math>L_{ij}</math> : kualitas air i yg dicantumkan dalam bu u mutu peruntukan air j</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Udara</li> </ul>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0.9} X (I_{eu} - 0.1) \right)$ <p>Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konservasi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100%.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</li> </ul>	$\frac{\text{Besaran Emisi GRK Tahun } i - \text{Besarana GRK tahun sebelumnya}}{\text{Besaran Emisi GRK Tahun sebelumnya}} \times 100$ <p>I = Tahun yang ingin diketahui</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah</li> </ul>	$\frac{\text{Besaran Emisi GRK tahun } i - \text{Besaran emisi GRK tahun sebelumnya}}{\text{Besaran Emisi GRK Tahun sebelumnya}} \times 100$ <p>I = Tahun yang ingin diketahui</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan</li> </ul>	$\frac{\text{Besaran Emisi GRK tahun } i - \text{Besaran emisi GRK tahun sebelumnya}}{\text{Besaran Emisi GRK Tahun sebelumnya}} \times 100$ <p>I = Tahun yang ingin diketahui</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Masyarakat Kepuasan</li> <li>Persentase pengguna yang memanfaatkan database kependudukan</li> <li>Persentase Desa/ Kelurahan Cepat Berkembang di Provinsi Riau</li> <li>Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Persentase lembaga Ekonomi desa yang Aktif</li> <li>Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik</li> <li>persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel</li> </ul>	<p>Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur melalui instrument khusus)</p> $\frac{\text{Jumlah OPD pengguna pemanfaatan database kependudukan}}{\text{Jumlah OPD Se Prov. Riau}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Desa dan Kel. Cepat BERkembang}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah LKD yang aktif}}{\text{Jumlah LKD Se Prov. Riau}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah BUMDes aktif}}{\text{Jumlah BUMDesa Se Prov. Riau}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Desa penyelenggaraan desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa Se Prov Riau}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yg akuntabel}}{\text{Jumlah Desa Se Prov Riau}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
13.	DINAS PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi</li> </ul>	$\frac{a + b + c + d + e}{5} \times 100\%$ <p>A. Persentase Peningkatan Layanan Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi            B. Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Jalan Dalam Provinsi            C. Jumlah Dokumen Pengembangan System Transportasi Dan Integrasi Antar Moda            D. Persentase Capaian Layanan Transportasi Perairan            E. Persentase SDM Bidang Teknis Perhubungan Yang Ditingkatkan Kompetesinya</p>
14.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> </ul>	<p>Hasil Penjumlahan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Kebijakan Internal di kali 17%</li> <li>Indikator Tata Kelola SPBE di kali 28%</li> <li>Indikator Layanan SPBE di Kali 55%</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Kebijakan Internal yang mencapai optimum dalam penilaian SPBE (17 INDIKATOR)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah dari nilai tingkat kematangan}}{\text{jumlah indikator}} \times 17\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Tata Kelola SPBE yang mencapai tahap optimum dalam penilaian SPBE (7 INDIKATOR)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah dari nilai tingkat kematangan}}{\text{jumlah indikator}} \times 28\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Layanan SPBE yang mencapai tahap optimum dalam penilaian SPBE (11 INDIKATOR)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah dari nilai tingkat kematangan}}{\text{jumlah indikator}} \times 55\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Sektoral dan Spasial per Kewenangan Urusan</li> <li>Persentase Keamanan Informasi Pemerintah</li> <li>Nilai produk sector industry terhadap PDRB</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah keterisian data}}{\text{jumlah komponen data keseluruhan}} \times 100\%$
15.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menerima Layanan Keamanan Informasi}}{\text{Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$
			Kontribusi sektor nilai industri terhadap total PDRB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kawasan industri yang beroperasi</li> <li>Jumlah SIKIM yang beroperasi</li> <li>Persentase pertumbuhan industry besar</li> </ul>	<p>Jumlah kawasan industry provinsi yang sudah operasional</p> <p>Jumlah SIKIM di Provinsi Riau yang beroperasi</p>
			$\frac{\text{Jumlah industri besar}_{(n)} - \text{Jumlah industri besar}_{(n-1)}}{\text{Jumlah industri besar}_{(n-1)}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pertumbuhan nilai output industri</li> </ul>	<p>n : Tahun berjalan n-1 : Tahun lalu</p> $\frac{\text{Jumlah output industri}_{(n)} - \text{Jumlah output industri}_{(n-1)}}{\text{Jumlah output industri}_{(n-1)}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah koperasi yang bersertifikat</li> </ul>		<p>N : Tahun berjalan n-1 : Tahun lalu</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Seluruh koperasi}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase usaha kecil yang naik kelas</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang naik kelas}}{\text{Jumlah Seluruh usaha kecil}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dengan harga stabil</li> </ul>	Kestabilan harga bahan pokok dan barang penting
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengaduan ditindaklanjuti</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh kasus pengaduan yang masuk}} \times 100\%$
16.	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan modal tetap bruto (PMTBP)</li> </ul>	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sisi konsumsi dalam 1 (satu) tahun
17.	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Sumber Daya Kepemudaan yang berkarakter, maju, dan mandiri</li> <li>• Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Provinsi Riau Yang Maju dan Unggul</li> <li>• Jumlah Sumber Daya Kepemudaan yang Berkapasitas</li> <li>• Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang</li> </ul>	<p>Jumlah Pemuda Kader + Jumlah Pemuda Pelopor + Jumlah Pemuda Wirausaha (Melalui Pelayanan Kepemudaan Dispora Prov. Riau)</p> <p>Jumlah Atlet Berprestasi Yang Dibina oleh Dispora : ( POPNAS + PEPARPENAS + POSPENAS + KEJURNAS PPLP + Kejuaraan Lainnya minimal Tingkat Wilayah )</p> <p>Jumlah Pemuda Kader + Jumlah Pemuda Pelopor + Jumlah Pemuda Wirausaha (Melalui Pelayanan Kepemudaan Dispora Prov. Riau)</p> <p>Jumlah Atlet Yang Dibina oleh Dispora Mengikuti Kejuaraan : POPNAS + PEPARPENAS + POSPENAS + KEJURNAS PPLP + Kejuaraan lainnya minimal Tingkat Wilayah</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
18.	DINAS KEBUDAYAAN	Kompetitif Nasional Ditingkat Pemajuan Budaya Melayu Riau	$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Perlindungan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan}}{\text{Jumlah data obyek pemakuan kebudayaan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Pengembangan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah obyek kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Pemanfaatan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah obyek kebudayaan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase SDM yang mendapatkan Pembinaan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah SDM kebudayaan yang terbina}}{\text{Jumlah SDM Kebudayaan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Kelembagaan yang mendapatkan Pembinaan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah lembaga kebudayaan yang terbina}}{\text{Jumlah lembaga kebudayaan}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Akreditasi Perpustakaan</li> <li>• Persentase Peningkatan Pelayanan, Aksebilitas dan Mutu Perpustakaan</li> <li>• Indeks Manajemen Kearsipan</li> <li>• Persentase Pengelola Kearsipan</li> </ul>	<p>Nilai/ prediket akreditasi perpustakaan Soeman Hs</p> $\frac{\text{Jumlah jenis layanan perpustakaan}}{\text{Jumlah sumber daya manusia layanan perpustakaan}} \times 100\%$ <p>Nilai / predikat kearsipan</p> $\frac{\text{Jumlah ASN pengelola arsip}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$
20.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTUP</li> <li>• NTN</li> </ul>	$NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>It = Indek yang diterima petani Ib BPPBM = indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal</p> $NTN = \frac{Yt}{Et} \times 100\%$ <p>Yt = Yft + YNFT Et = Eft + Ekt Yt = Total Penerimaan Pelayanan (Rp.) Et = Total Pengeluaran Nelayan Yft = Total Penerimaan Nelayan dari Usaha Perikanan (Rp.) YNFT = Total Penerimaan nelayan dari Non Perikanan (Rp.)</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
			<p>Eft = Total Pengeluaran Nelayan untuk Usaha Perikanan (Rp.)</p> <p>Ekt = Total Pengeluaran Nelayan untuk Konsumsi Keluarga Nelayan (Rp.)</p> <p>T = Periode waktu (bulan, tahun, dan lain lain)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTPI</li> </ul>		$NTPI = \frac{Eft}{Ekt} \times 100\%$ <p>IT = indeks Harga yang diterima pembudidaya ikan</p> <p>IB = Indeks Harga yang dibayar pembudidaya ikan</p> <p>Jumlah hasil Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Perairan umum daratan) ditambah dengan jumlah produksi perikanan budidaya</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Perikanan (Ton)</li> </ul>	Produksi Perikanan (Ton)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Menurunnya IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unreported Fishing)</li> </ul>	Produksi Perikanan Budidaya	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Perikanan Budidaya</li> </ol>	Produksi Perikanan Budidaya	<p>A = N x Prod/n</p> <p>A = Hasil Perhitungan Produksi (angka agregat)</p> <p>N = Jumlah Populasi (luas lahan (m<sup>2</sup>))</p> <p>Prod = Jumlah Sampling</p> <p>n = Jumlah Produksi Sampling (kg)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah Perikanan Tangkap</li> </ol>	Produksi Perikanan Tangkap	<p>A = N x Prod/n</p> <p>A = Hasil Perhitungan Produksi (angka agregat)</p> <p>N = Jumlah Populasi (Jumlah kapal, alat laut)</p> <p>Prod = Jumlah Sampling</p> <p>n = Jumlah Produksi Sampling (kg)</p>
21.	DINAS PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase peningkatan pengeluaran wisatawan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Pengeluaran Tahun } n - \text{Jumlah Pengeluaran Tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Pengeluaran Tahun } (n - 1)} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</li> </ul>	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara</li> </ul>	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)</li> </ul>	$\frac{\text{Lama Menginap Wisman}}{\text{Jumlah wisma yang menggunakan akomodasi}} \times 100\%$
22.	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks ketahanan pangan</li> </ul>	$100 - (H(G + (1 - G)I^p + 0,5Q(1 - H(G + (1 - G)I^p))) \times 100$ <p>Dimana:  H : rasio penduduk yang mengalami kekurangan pangan terhadap jumlah penduduk  G: proporsi angka kekurangan energi terhadap angka rata-rata kebutuhan energi  I<sup>p</sup> : ketimpangan dalam distribusi yang diukur dengan koefisien GINI dari distribusi konsumsi energi  Q : koefisien variasi DES ketersediaan energi untuk konsumsi energi/protein</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pangan Segar</li> </ul>	Keamanan Pangan Segar	$\frac{\text{Jumlah Pangan Segar (buah dan Sayur) yang bebas Residu Pestisida}}{\text{Jumlah sampel pangan segar yang diuji pestisida}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skor PPH Konsumsi</li> </ul>	Skor PPH Konsumsi	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (%AKE X bobot masing-masing kelompok pangan)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skor PPH Ketersediaan</li> </ul>	Skor PPH Ketersediaan	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (%AKG X bobot masing-masing kelompok pangan)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Tanaman Pangan</li> </ul>	NTUP	$NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>It = Indek yang diterima petani  Ib BPPBM = indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Hortikultura</li> </ul>	NTUP	$NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
			<p>It = Indek yang diterima petani            Ib BPPBM = indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi Padi (Ton)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi Jagung</li> </ul>	<p>Jumlah luas panen padi tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan (Data Statistik Pertanian (SP) BPS Provinsi Riau)</p>
23.	<b>DINAS PERKEBUNAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NTUP</li> </ul>	<p>Jumlah luas panen jagung tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan (Data Statistik Pertanian (SP) BPS Provinsi Riau)</p> $\frac{NTUP}{Ib\ BPPBM} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (Ib BPPBM)</li> <li>Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan indeks harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung dengan menggunakan formula modified laspeyers indeks</li> </ul> <p>Sumber data : BPS</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi kelapa sawit</li> </ul>		<p><math>PRODUKSI = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produksi (kg)}}{1000}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester laporan</li> <li>Perhitungan jumlah produksi harus dalam bentuk/wujud yang sama dan diperlukan konversi dan penentuan wujud produksi yang akan dicatat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah produksi kelapa</li> </ul>		<p><math>PRODUKSI = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produksi (kg)}}{1000}</math></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah produksi karet</li> </ul>		<p><math>PRODUKSI = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produksi (kg)}}{1000}</math></p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi Sagu</li> </ul>	$\text{PRODUKSI} = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produksi (kg)}}{1000}$
24.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Tukar Pertanian Peternakan</li> </ul>	$NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>It = Indeks yang diterima petani  Ib BPPBM = indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal</li> </ul>	$\sum \text{Pemotongan Ternak Lokal} \times \text{Berat Karkas (Kg)}$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kesehatan hewan</li> </ul>	$\frac{\text{Populasi} - \sum \text{Hewan Sakit}}{\text{Populasi}} \times 100\%$
25.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio elektifikasi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah RT yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah Total RT}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Pertambangan yang tertib Adm, Teknis, Lingkungan dan Keunagan}}{\text{Jumlah Izin Usaha Pertambangan Keseluruhan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah}}{\text{Jumlah pengguna air tanah yang berizin}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik (KK)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensitas Energi (TOE/Milyar Rupiah)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Energi}}{\text{PDRB}}$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Realisasi Pencapaian Target Pembangunan Daerah</li> <li>Persentase Capaian Rata-Rata Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Akuntabel</li> <li>Persentase hasil kelibangan yang diimplementasikan</li> <li>Persentase hasil kerjasama pembangunan yang difasilitasi</li> <li>Angka Penerimaan Daerah</li> <li>Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>Opini BPK</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Indikator hasil outcome program dalam RKPD pada tahun } n \text{ yang dicapainya baik}}{\sum \text{Indikator hasil outcome program}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Indikator Sasaran RPJMD pada tahun } n \text{ yang capaiannya baik}}{\sum \text{Indikator Sasaran RPJMD}} \times 100$ $\frac{\sum \text{hasil kelibangan yang diimplementasikan}}{\sum \text{keseluruhan hasil kelibangan}} \times 100$ $\frac{\sum \text{Kerjasama yang difasilitasi}}{\sum \text{keseluruhan kerjasama}} \times 100$ Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah selama 1 tahun $\frac{\text{realisasi } n - \text{realisasi } (n - 1)}{\text{realisasi tahun } (n - 1)} \times 100\%$ Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Opini BPK Terhadap APBD Provinsi Riau sesuai ketentuan
27.	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
28.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan penyusunan APBD Provinsi Riau</li> </ul>	Waktu penyampaian RAPBD – waktu pendandatangan Nota Kesepakatan KUA PPAS sesuai ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan penetapan APBD Provinsi Riau</li> </ul>	Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata pemrosesan perintah membayar (SPM)</li> </ul>	Berdasarkan Pasal 129 Ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara umum Daerah (BUD) memproses SPM dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lam 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya SPM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Opini BPK terhadap Laporan pemerintah (LKPD)</li> </ul>	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase asset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan yang telah diinventarisasi}}{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklajuti hasil evaluasi Ranperda APBD</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kabupaten kota yang menindaklajuti Hasil evaluasi Ranperda APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota di Provinsi Riau}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklajuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kabupaten kota yang menindaklajuti Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota di Provinsi Riau}} \times 100\%$

FORMULASI PERHITUNGAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH	NO
29.	Rata rata nilai indeks profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN $\frac{\text{Jumlah rata rata survey kepuasan pelayanan administrasi kepegawian}}{\text{Jumlah PNS Provinsi Riau}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Profesionalitas ASN</li> <li>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</li> <li>Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik</li> </ul>	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
30.	Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per orang per tahun $\frac{\text{Jumlah seluruh ASN}}{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi minimal 20 jam pelajaran per orang per tahun</li> </ul>	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
31.	Jumlah ASN yang lulus mengikuti diklat $\frac{\text{Jumlah seluruh ASN yang mengikuti diklat}}{\text{Jumlah seluruh ASN yang mengikuti diklat}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Total Usulan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahun n}}{\text{Jumlah Total Usulan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahun n}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Pelayanan Diklat</li> <li>Persentase Kelulusan Peserta Diklat</li> <li>Prosentase Penanggulangan Bencana</li> <li>Prosentase Penyelenggaraan</li> </ul>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
32.	BADAN PENGHUBUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penghubung</li> <li>Indeks Kepuasan Stakeholder</li> <li>Indeks Kepuasan Pengunjung Anjungan Riau</li> </ul>	$\frac{\text{Indeks kepuasan stakeholder} + \text{Indeks kepuasan pengunjung anjungan riau}}{2} \times 100\%$ <p>= Indeks kepuasan masyarakat kepada layanan badan penghubung</p> $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>= Indeks kepuasan masyarakat (Stakeholder)</p> $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>= Indeks kepuasan pengunjung anjungan riau</p>
33.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Demokrasi Indonesia</li> <li>Indeks Demokrasi Lembaga Demokrasi</li> <li>Indeks Kebebasan Sipil</li> <li>Indeks Hak-Hak Politik</li> </ul>	$IDI_{\text{Provinsi Riau}} = \sum_{i=3}^3 P_i I^{(A_i)}$ <p>IDI Provinsi Riau = Indeks Demokrasi Provinsi Riau</p> <p>P<sub>i</sub> = Nilai Penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-I (i=1,2,3)</p> <p>I (A<sub>i</sub>) = Indeks aspek ke-i</p> $I (A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I (V_{ij})$ <p>I (A<sub>i</sub>) : Indeks Aspek ke i</p> <p>P<sub>ij</sub> : Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i</p> <p>I (V<sub>ij</sub>) : Indeks variabel ke j dari aspek ke i</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
			AHP : Analytical Hierarchy Procedure
34.	SEKRETARIAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penataan Kebijakan Pemerintahan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial</li> </ul>	$\frac{\text{Dokumen yang dproses verifikasi}}{\text{Jumlah Dokumen (permohonan) yang masuk}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Reformasi Informasi</li> </ul>	Nilai indeks Reformasi Birokrasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penataan Kebijakan Pemerintahan di Bidang Keagamaan</li> </ul>	$\frac{\text{Dokumen yang dproses verifikasi}}{\text{Jumlah Dokumen (permohonan) yang masuk}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai dan Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul>	Indeks Reformasi Birokrasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Deviden BUMD (rupiah)</li> </ul>	Jumlah Akumulasi Deviden BUMD Provinsi Riau (Rp)
35.	SEKRETARIAT DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Layanan Kepada Lembaga DPRD</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah nilai kepuasan layanan}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase capaian layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah persentase realisasi layanan}}{\text{Jumlah layanan diberikan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase capaian layanan terhadap hak-hak keuangan dan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah nilai kepuasan layanan}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase capaian layanan terhadap peningkatan kapasitas Anggota DPRD</li> </ul>		$\frac{\text{Jumlah nilai kepuasan layanan}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\%$
36.	<b>INSPEKTORAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK</li> <li>• Presentase penyelesaian TLHP-BPK</li> <li>• Presentase rekomendasi APIP yang ditindak lanjuti</li> <li>• Jumlah OPD yang berkinerja baik</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang direkomendasikan BPK}}{\text{Jumlah rekomendasi BPK}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang direkomendasikan BPK}}{\text{Jumlah rekomendasi BPK}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang direkomendasikan APIP (Inspektorat + Inspektorat Jenderal Kemendagri)}}{\text{Jumlah rekomendasi APIP}} \times 100\%$
			Jumlah OPD yang mendapat nilai Baik (B) dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah OPD dengan SPIP Level 3</li> </ul>		Jumlah OPD yang mendapat level 3 pada penerapan SPIP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Level Kapabilitas APIP</li> </ul>		Tingkat level kapabilitas Inspektorat yang hendak dicapai yang di Quality Assurance (QA) oleh BPKP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah OPD yang diusulkan Predikat WBK/WBBM</li> </ul>		Jumlah OPD yang diterima usulannya oleh Kemenpan RB untuk penilaian WBK/WBBM

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase OPD yang dibina</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah OPD yang dibina}}{\text{Jumlah OPD yang ada}}$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kabupaten/ Kota yang dibina</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang dibina}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang ada}}$

**GUBERNUR RIAU,**

**RAHMAN HADI**